



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa pangan merupakan kebijakan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap orang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang sebagai wujud pelaksanaan urusan pemerintahan;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan aksi daerah pangan dan gizi, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI TAHUN 2024-2026.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah serangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara.
7. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

BAB II  
RAD-PG

Pasal 2

Dalam Peraturan Bupati ini disusun RAD-PG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kondisi Umum;
- c. BAB III : Rencana Aksi Pangan dan Gizi Multisektor;
- d. BAB IV : Kerangka Pelaksanaan Rencana Aksi;
- e. BAB V : Monitoring , Evaluasi dan Pelaporan; dan
- f. BAB VI : Penutup.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Daerah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Daerah.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-12-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 18-12-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

***Cap ttd,***

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



Syahbudin Usmoyo, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19740223 199803 1 006

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 46 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
TAHUN 2024-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tujuan dari pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satu ukuran dari keberhasilan pembangunan adalah tercapainya status gizi masyarakat yang optimal sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu faktor yang berperan penting untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing adalah melalui pembangunan pangan dan gizi terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK) yaitu sejak janin dalam kandungan sampai anak berusia dua tahun yang merupakan kesempatan emas untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal.

Keberhasilan pembangunan suatu bangsa ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yaitu SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta cerdas. Bukti empiris menunjukkan bahwa hal ini sangat ditentukan oleh status gizi yang baik, dan status gizi yang baik ditentukan oleh jumlah asupan pangan yang dikonsumsi. Oleh karena itu pemenuhan pangan dan gizi untuk kesehatan warga negara merupakan investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumberdaya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta tangkas dan cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik. Status gizi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas asupan pangan yang dikonsumsi. Banjarnegara saat ini mengalami beban gizi ganda (double burden malnutrition) yaitu masih tingginya masalah kekurangan gizi dan kelebihan gizi pada semua siklus kehidupan. Masalah gizi buruk dan kurang dipengaruhi secara langsung oleh faktor konsumsi makanan dan penyakit infeksi. Secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan dan konsumsi pangan beragam, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik. Dampak buruk kekurangan gizi berakibat pada rendahnya produktivitas kerja, hilangnya kesempatan sekolah dan hilangnya sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi. Oleh karena itu investasi di bidang gizi sangat penting dalam upaya memutuskan lingkaran setan kemiskinan dan kurang gizi dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas.

Salah satu tujuan pembangunan di Indonesia adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan arah kebijakan pemerintah untuk tercapainya tujuan tersebut adalah mewujudkan ketahanan pangan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhi pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.

Sumberdaya manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan pembangunan sehingga untuk mendapatkan kualitas sumberdaya manusia sangat ditentukan oleh status gizi yang baik. Status gizi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas pangan yang dikonsumsi. Beberapa dampak buruk kurang gizi adalah:

1. rendahnya produktivitas kerja;
2. kehilangan kesempatan sekolah; dan
3. kehilangan sumberdaya karena biaya kesehatan yang tinggi.

Agar individu tidak kekurangan gizi maka akses setiap individu terhadap pangan harus dijamin. Akses pangan setiap individu ini sangat tergantung pada ketersediaan pangan dan kemampuan untuk mengaksesnya secara berkelanjutan. Kemampuan mengakses ini dipengaruhi oleh daya beli, yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kemiskinan seseorang. Upaya-upaya untuk menjamin kecukupan pangan dan gizi serta kesempatan pendidikan tersebut akan mendukung komitmen pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan suatu bangsa. SDM yang memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, kesehatan yang prima, serta tangkas dan cerdas sangat ditentukan oleh status gizi yang baik. Status gizi sangat dipengaruhi oleh jumlah dan kualitas asupan pangan yang dikonsumsi. Timbulnya masalah gizi dipengaruhi secara langsung oleh konsumsi makanan dan penyakit infeksi dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh pola asuh, ketersediaan dan konsumsi pangan beragam, faktor sosial ekonomi, budaya dan politik.

Permasalahan pangan gizi di Kabupaten Banjarnegara perlu mendapatkan penanganan melalui pendekatan multisektoral baik sektor kesehatan maupun non kesehatan, sehingga di dalam penyusunan RAD-PG dilakukan dengan pengelompokan dalam bentuk 4 Tujuan Strategis Rencana Aksi yaitu :

1. Peningkatan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA);
  2. Peningkatan Keterjangkauan Pangan B2SA;
  3. Peningkatan Pemanfaatan Pangan dan Pelayanan Gizi (esensial);
  4. Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola Pangan dan Gizi
- dengan melibatkan semua Perangkat Daerah terkait di Kabupaten Banjarnegara sehingga penanganan masalah gizi di Kabupaten Banjarnegara bisa teratasi.

## B. PEMBANGUNAN PANGAN DAN GIZI

Pembangunan pangan dan gizi memiliki dimensi yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Selain aspek pangan, status gizi juga dipengaruhi oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana, dan perlindungan anak. Sehingga seluruh sektor yang berkaitan dengan faktor-faktor tersebut perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Pangan menjadi hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam *Universal Declaration of Human Right* (1948) dan *The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (1966). Pernyataan pangan sebagai hak asasi manusia menjadi kesepakatan pada *Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit* tahun 1996 yang berisi tentang pemberian tekanan pada hak atas pemenuhan kebutuhan pangan secara cukup, dan perlunya aksi bersama antar negara untuk mengurangi kelaparan.

Pembangunan pangan dan gizi memiliki cakupan yang luas mulai dari aspek produksi pangan, distribusi, konsumsi yang dapat mempengaruhi status gizi. Status gizi dipengaruhi juga oleh faktor pola asuh dan kesehatan lingkungan, serta kualitas pelayanan kesehatan. Masalah gizi juga terkait dengan pendidikan, budaya, agama, infrastruktur, air bersih, higiene-sanitasi, teknologi dan industri, kemiskinan, komunikasi dan informasi, pembangunan desa, pengawasan obat dan makanan, keluarga berencana dan perlindungan anak. Semua sektor yang terkait perlu berkoordinasi sehingga tercapai status gizi yang optimal.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penunjang pembangunan pangan dan gizi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi, menegaskan bahwa pembangunan pangan dan gizi dilaksanakan dalam satu kesatuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Koordinasi antar lintas sektor Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan melalui berbagai kebijakan, program, dan kegiatan dilakukan guna memberikan daya ungkit dan dorongan kuat yang efektif dan efisien di bidang pangan dan gizi. Lima bidang yang tercantum dalam Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) antara lain;

- a. ketersediaan pangan;
- b. keterjangkauan pangan;
- c. pemanfaatan pangan;
- d. perbaikan gizi masyarakat; dan
- e. penguatan kelembagaan pangan dan gizi.

Berdasarkan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Visi Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 misi yang terejawantahkan ke dalam tujuan agenda pembangunan. Pembangunan bidang pangan termasuk dalam agenda pembangunan pertama yaitu memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dan pembangunan bidang gizi termasuk ke dalam agenda pembangunan ketiga yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

#### C. HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN LAINNYA

Sejalan dengan visi “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian” dalam RPJPD 2005 – 2025 ini Pemerintah Kabupaten Banjarnegara menyatakan dengan jelas kondisi yang ingin dicapai dari berjalannya roda pemerintahan. Kondisi dimana setiap individu dapat berperan serta aktif dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga segala kebutuhan dapat terpenuhi utamanya pada kebutuhan dasar. Pencapaian pokok visi ini ditandai dengan meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dasar melalui peningkatan perekonomian masyarakat berbasis sektor unggulan dengan tetap menjaga kualitas lingkungan hidup.

Implementasi visi tersebut dirumuskan dalam Visi, Misi dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026, prioritas pembangunan adalah Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat. Serta Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai. Laju perekonomian yang baik membutuhkan dukungan infrastruktur yang baik. Pada pembangunan ekonomi, Kabupaten Banjarnegara bertopang pada penguatan ekonomi kerakyatan di bidang Pertanian dan Pariwisata. Meski mendorong pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten tidak melewatkan sisi pemerataan pembangunan mengingat kondisi geografis Kabupaten Banjarnegara yang luas. Pembangunan yang dilakukan juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan agar nantinya lingkungan yang kita miliki dapat dinikmati oleh generasi penerus.

Disamping itu juga dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 dengan visi “Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian”, khususnya misi ke 1. Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai – nilai luhur budaya masyarakat, misi ke 5. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya kualitas tata air (air bersih, irigasi, bendung) yang mendukung terciptanya ketahanan pangan, meningkatnya jaringan infrastruktur jalan, transportasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas factor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi, wisata dan mampu membuka isolasi wilayah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, terpenuhinya perumahan yang layak huni yang dilengkapi dengan fasilitas pendukungnya untuk mengatasi wilayah yang kumuh; serta misi ke 6. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan menurunnya kuantitas dan kualitas penyandang sosial, meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat, terpenuhinya kesatuan dan persatuan serta kerukunan masyarakat, meningkatnya perlindungan dan pengayoman masyarakat terhadap segala tindak kejahatan, menurunnya kasus kekerasan, berkurangnya tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin serta mantapnya situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh kepastian hukum dan penegakan HAM.

Peningkatan kinerja sektor pertanian dan perikanan dilakukan dengan strategi Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan, Peningkatan sumber daya dan kelembagaan pertanian dan perikanan, dan Peningkatan penanganan pasca panen dengan kebijakan yang diambil adalah :

1. Mengendalikan laju alih fungsi lahan pertanian;
2. Memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan;
3. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan;
4. Memfasilitasi pencegahan dan penanganan gagal panen,
5. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan,
6. Meningkatkan kualitas kelembagaan pertanian dan perikanan,

7. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan dan Meningkatkan pengolahan pasca panen.

Program kegiatan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Banjarnegara adalah :

1. Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan lumbung pangan masyarakat;
2. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kerawanan pangan melalui Pengembangan Desa Mandiri Pangan;
3. Pengembangan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala;
4. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi keluarga;
5. Pemberdayaan masyarakat dalam ketahanan pangan melalui pemberian penghargaan, promosi, kampanye dan pendampingan;
6. Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan;
7. Peningkatan kesadaran mutu dan keamanan produk pangan kepada pelaku usaha bidang pangan serta konsumen;
8. Pengembangan komoditas pangan alternatif;
9. Peningkatan Produksi dan Produktivitas pertanian;
10. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan petani;
11. Peningkatan dukungan terhadap pengelolaan lahan kering dan air tanah untuk pengembangan komoditas pangan.

Dalam RPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2023-2026 ditegaskan kebijakan yang ditempuh Pemerintah dalam meningkatkan status gizi masyarakat adalah dengan melalui Misi yang pertama yaitu Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat. Dengan tujuan Meningkatkan cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas. Adapun Program prioritas pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat; pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan; pengelolaan Pendidikan; pendidik dan tenaga kependidikan; pengelolaan Pendidikan; penyelenggaraan jalan; pengelolaan dan pengembangan sistem drainase; penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); perumahan dan kawasan permukiman kumuh; pengembangan perumahan; pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum; koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah; perlindungan jaminan sosial; pemberdayaan sosial; serta rehabilitasi sosial.

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu alat perencanaan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah. Oleh sebab itu, Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen-dokumen perencanaan lainnya seperti:

1. Dokumen RPJP Nasional
2. Dokumen RPJM Nasional
3. Dokumen RAN Pangan dan Gizi
4. Dokumen RPJP Provinsi Jawa Tengah
5. Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah
6. Dokumen RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah
7. Dokumen RPJPD Kabupaten Banjarnegara.
8. Dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara
9. Dokumen renstra masing-masing OPD di tingkat Kabupaten, dan

10. Dokumen RKPD yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Banjarnegara yang memuat program/kegiatan setiap OPD.

#### D. MAKSUD DAN TUJUAN

RAD-PG menjadi bagian dari upaya mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian status gizi bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Khususnya Pasal 63 ayat 3 yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi. Penyusunan RAD-PG ditujukan untuk menjadi panduan dan arahan serta acuan bagi institusi pemerintah, lembaga/organisasi masyarakat dan swasta untuk berperan serta meningkatkan kontribusi yang optimal dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di Kabupaten Banjarnegara.

Tujuan penyusunan RAD-PG sebagai berikut :

1. Mengintegrasikan dan menyelaraskan perencanaan pangan dan gizi, melalui peningkatan pemahaman, peran dan komitmen pemangku kepentingan.
2. Memberikan panduan, arahan serta acuan bagi Perangkat Daerah, lembaga / organisasi masyarakat dan swasta dalam menyusun rencana pembangunan pangan dan gizi dengan pendekatan multisektor.

#### E. DASAR PENYUSUNAN RAD-PG

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, khususnya Pasal 63 (ayat 3) yang menyebutkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Bab VIII Gizi Pasal 141, 142, 143;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026.

## BAB II KONDISI UMUM

### A. CAPAIAN PEMBANGUNAN BIDANG PANGAN

#### 1. Ketersediaan Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan secara langsung berpengaruh terhadap kesehatan dan status gizi. Pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat menjadi salah satu faktor penentu utama keberhasilan pembangunan gizi di suatu wilayah atau daerah. Situasi pangan berkaitan dengan keadaan kemampuan semua sumber daya yang dimiliki suatu daerah untuk memperoleh pangan yang cukup untuk kebutuhan gizinya. Situasi pangan ini mencakup ketersediaan pangan, distribusi pangan, akses pangan dan stabilitas harga pangan, serta konsumsi pangan.

Ketersediaan pangan sebagai salah satu sub sistem ketahanan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan seluruh penduduk dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan mencerminkan pangan yang tersedia untuk dikonsumsi masyarakat yang merupakan produksi daerah dengan mempertimbangkan penggunaan untuk bibit/benih, industri, kehilangan/susut, ekspor dan stock ditambah impor. Pemantauan ketersediaan pangan dilakukan dengan melibatkan dinas teknis, kemudian data ketersediaan secara integral dihitung berdasarkan data produksi dari seluruh instansi yang terlibat dan dibahas pada rapat tim teknis ketersediaan pangan tingkat Kabupaten.

Ketersediaan pangan wilayah disajikan dalam Neraca Bahan Makanan (NBM), menggambarkan secara menyeluruh tentang situasi pengadaan/penyediaan pangan (*food supply*) dan penggunaan pangan (*food utilization*) hingga ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk pada suatu wilayah (Negara/Provinsi/Kabupaten/Kota) dalam suatu kurun waktu tertentu (biasanya satu tahun). Berdasarkan analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2020, angka ketersediaan energi dan Protein di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 2.1 Capaian Ketersediaan Energi dan Protein  
Kabupaten Banjarnegara

Tahun	Energi (Kkal/kap/hari)	Protein (Gram/kap/hari)
2023	3.404	81,46

Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Trend ketersediaan energi dan protein di Kabupaten Banjarnegara mengalami peningkatan setiap tahunnya. Rata-rata ketersediaan energi tahun 2023 sebesar 3.404 Kkal/kap/hari dan protein 81,46 Gr/kap/hari. Dari Kondisi tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan pangan di Kabupaten Banjarnegara masih lebih tinggi dibandingkan standar yang ditetapkan pada Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WKNPG) XI tahun 2020, (ketersediaan energi 2.400 Kkal/kap/hari dan ketersediaan protein 63 Gr/kap/hari). Persentase ketersediaan terhadap rekomendasi WNPG XI 2020 adalah Energi 141,8% dan Protein 129,3%.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal ini dilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA Nasional. IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan prioritas intervensi program. Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022 Peringkat ke 168 dengan Skor 78,61 di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 82,95. Sedangkan Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 naik Peringkat ke 155 dengan Skor 80,28 di bawah Provinsi Jawa Tengah sebesar 84,80.

Secara lengkap Data Tahun 2023 Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA), Indeks Pemanfaatan (IP) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah : IK 82,06, IA 77,38, IP 81,13 dan IKP 80,28.

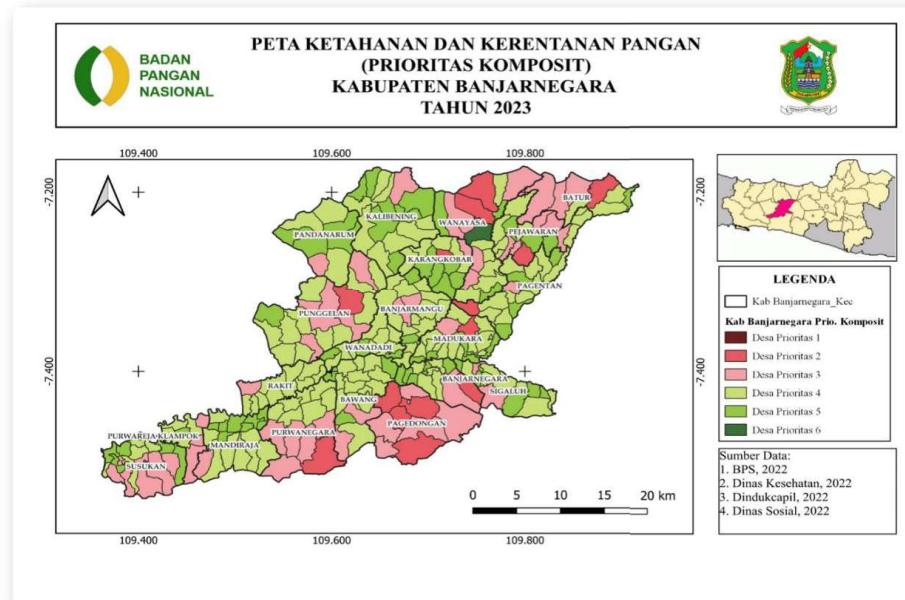
Sedangkan Data Indeks Ketersediaan (IK), Indeks Keterjangkauan (IA), Indeks Pemanfaatan (IP) dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah : IK 87,69, IA 83,44, IP 83,61 dan IKP 84,80.

Ketahanan dan kerentanan pangan dapat ditunjukkan dengan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security And Vulnerability Atlas - FSVA) yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun.

Peta FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis dari hasil analisa data indikator kerentanan terhadap kerawanan pangan. Informasi dalam peta FSVA dapat menjelaskan lokasi wilayah rentan terhadap kerawanan pangan dan indikator utama daerah tersebut rentan terhadap kerawanan pangan.

Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada prioritas 1 (kategori tingkat rentan pangan tinggi) hingga prioritas 6 (kategori tahan pangan tinggi). Kondisi ideal suatu wilayah bila termasuk pada kategori prioritas 6.

Gambar 2.1. Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Prioritas Komposit) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Berdasarkan hasil analisis FSVA 2023 menunjukkan bahwa desa rentan pangan Prioritas 1-3 sebanyak 65 desa dari 278 desa (23,39 %) yang terdiri dari 14 desa (5,04%) Prioritas 2; 51 desa (18,35%) Prioritas 3. Desa prioritas 2 tersebar 1 desa di kecamatan Purwanegara, 1 Desa di Kecamatan Banjarnegara, 4 Desa di Kecamatan Pagedongan, 1 Desa di Kecamatan Madukara, 1 Desa di Kecamatan Punggelan, 1 Desa di Kecamatan Karangkoobar, 1 Desa di Kecamatan Pagentan, 1 Desa di Kecamatan Pejawaran, 1 Desa di Kecamatan Batur dan 2 desa di Kecamatan Wanayasa. Desa prioritas 3 tersebar hampir merata di seluruh kecamatan di Kabupaten Banjarnegara, hanya desa di kecamatan Wanadadi yang tidak masuk kedalam prioritas 3. Desa tahan pangan Prioritas 4-6 sebanyak 213 desa (76,62%) dari 278 desa yang terdiri dari 144 (51,80%) desa Prioritas 4, 68 (24,46%) desa Prioritas 5 dan 1 desa (0,36%) Prioritas 6. Sebaran data desa rentan pangan berdasarkan wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:

- a. Prioritas 2 (kategori rentan pangan sedang) di desa Cendana Kecamatan Banjarnegara, Desa Kepakisan Kecamatan Batur, Desa Ambal Kecamatan Karangkoobar, Desa Gununggiana Kecamatan Madukara, Desa Gentansari, Gunungjati, Kebutuhjurang dan Pagedongan di Kecamatan Pagedongan, Desa Nagasari Kecamatan Pagentan, Desa Dermayasa Kecamatan Pejawaran, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Desa Petir Kecamatan Purwanegara, dan Desa Jatilawang, Wanaraja di Kecamatan Wanayasa.
- b. Prioritas 3 (kategori rentan pangan rendah) di wilayah Kecamatan Banjarmangu (2 Desa), Banjarnegara (2 Desa), Batur (3 Desa), Bawang (2 Desa), Kalibening (1 Desa), Karangkoobar (1 Desa) Madukara (1 Desa) Mandiraja (1 Desa), Pagedongan (5 Desa), Pagentan (1 Desa), Pandanarum (1 Desa), Pejawaran (5 Desa), Punggelan (5 Desa), Purwanegara ( 5 Desa), Purwareja Klampok (3 Desa), Rakit (1 Desa), Sigaluh (2 Desa), Susukan (5 Desa), Wanayasa (5 desa).

Secara umum desa rentan terhadap kerawanan pangan disebabkan oleh: (1) Rasio luas lahan pertanian terhadap jumlah penduduk rendah, (2) Rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga rendah, (3) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap jumlah penduduk desa tinggi, (4) Desa yang tidak memiliki akses penghubung memadai melalui darat, air atau udara, (5) Rasio jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih terhadap jumlah rumah tangga desa tinggi, dan (6) rasio jumlah tenaga kesehatan terhadap jumlah penduduk desa tinggi.

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga diukur dengan besarnya nilai koefisien variasi (*coefficient of variation* = CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu tahun 2019-2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2 Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

NO	KOMODITAS	KOEFSIEN VARIASI					RATA-RATA
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Tepung Terigu	1,22	2,72	1,59	0	2	1,51
2	Minyak Goreng	6,88	2,42	3,22	4,75	3	4,05
3	Daging Sapi	3,17	1,21	1,63	3,73	3	2,55
4	Telur Ayam Ras	6,88	6,43	6,82	5,09	5	6,04
5	Daging Ayam Ras	5,55	3,13	6,48	3,39	7	5,11
6	Cabai Merah Keriting	34,55	40,47	22,60	42,02	38	35,73
7	Bawang Merah	9,76	17,39	20,18	22,64	20	17,99
8	Gula Pasir Lokal	9,89	4,20	3,25	3,76	8	5,82
9	Kedelai	3,65	3,17	1,27	0	0	1,68
10	Jagung	4,27	8,06	3,41	14,27	10	8,0
11	Beras Termurah	1,51	4,59	3,18	2,12	0	2,28
12	Beras Medium	1,34	2,60	4,38	3,42	7	3,75
13	Beras Premium	1,53	2,41	2,94	4,61	6	3,49

Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Beberapa komoditas dengan tingkat fluktuasi harga cukup tinggi antara lain cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras, jagung dan gula pasir lokal.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu 96,1.

Tabel 2.3 Skor PPH Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No.	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	25,0	24,90	25,00	25,00	25	25
2	Umbi-umbian	2,5	1,90	0,88	1,42	1,8	1,5
3	Pangan Hewani	24,0	19,20	19,45	17,09	19,2	24
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,00	5,00	5	5,0
5	Buah/biji berminyak	1,0	0,90	1,00	0,70	0,9	0,5
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	6,87	10,00	7,1	8,2
7	Gula	2,5	2,00	2,50	2,37	2,5	2,0
8	Sayur & buah	30,0	28,00	25,71	25,71	30	30
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0	0
Skor PPH Kabupaten		100,0	90	85,7	85,9	91,5	96,1
Skor PPH Jateng		100,0	91,80	86,41	87,30	89,5	94,2
Skor PPH Nasional		100,0	85,20	90,40	90,70	90,8	94,1

Sumber: Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Untuk tahun 2023 standar konsumsi yang digunakan adalah sebesar 2.100 kkal/kapita/hari, sesuai dengan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI Tahun 2020. Capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Capaian Konsumsi Per Kelompok Pangan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No	Indikator	Satuan	Ideal WNPG XI	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beras	(Kg/Kap/Th)	97,80	89,0	104	81,79	80,52	83,5
2	Umbi-umbian	(Kg/Kap/Th)	39,20	25,0	18,6	21,06	27,01	20,29
3	Pangan hewani	(Kg/Kap/Th)	58,80	35,0	34,6	28,12	39,9	37,3
4	Sayur dan buah	(Kg/Kap/Th)	98,10	122,7	112,7	89,6	106,98	104,3

Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Tabel 2.5 Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No	Kelompok Pangan	Ideal WNPG XI	Tahun				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Padi-padian	1.075,0	1.280,7	1206,9	1126,7	1170,7	1084
2	Umbi-umbian	129,0	78,1	55,1	64,4	83,2	63
3	Pangan Hewani	258,0	206,5	219,5	185	236,7	253
4	Minyak & lemak	215,0	241,5	289,2	355	305,4	276
5	Buah/biji berminyak	64,0	40	20,5	7,5	24,8	20
6	Kacang-kacangan	108,0	76,7	75,4	98,8	77,8	86
7	Gula	108,0	125,7	101,9	87,6	115,2	86
8	Sayur & buah	129,0	155,1	145,2	124,2	133,8	153
9	Lain-lain	64,0	52,4	53	58,5	55,1	52
JUMLAH		2100	2256,6	2166,5	2107	2202,7	2073

Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Dari tabel tersebut di atas, pada capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi per kapita/hari menunjukkan bahwa konsumsi kelompok pangan berupa padi-padian, terutama beras, perlu diturunkan atau dikurangi. Adapun konsumsi pada kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, sayur dan buah, serta lain-lain perlu ditingkatkan atau ditambah.

Masih ditemukannya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar yang masih dilaksanakan secara insidental, belum secara rutin dan tersebar di semua wilayah Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2.6 Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2019-2023 di Kabupaten Banjarnegara

Uraian	Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023	
	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman
Prima 2			-	-	-	-	-	-	-	-
Prima 3	8	8	10	10	10	10	4	4	-	-
Sertifikat organik	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-
Registrasi PSAT	39	39	51	51	83	83	5	5	10	10
Pengawasan Pangan Segar	70	66	79	67	168	160	78	68	150	134
Total	117	113	140	128	261	253	89	79	160	144
Prosentase Aman	96,58%		91,43%		96,93 %		88,76%		90%	

Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Memperhatikan tabel di atas, perlu ditingkatkan pengawasan terhadap proses produksi pangan segar, baik dari jumlah komoditas maupun waktu pelaksanaannya, mengingat persentase keamanan pangan segar di Kabupaten Banjarnegara belum optimal.

## 2. Produksi Bahan Pangan

Produksi bahan pangan di Kabupaten Banjarnegara terdiri dari Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan.

### 1) Produksi tanaman pangan

Data dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara menyebutkan bahwa kurun waktu 2019-2023 rata-rata luas panen dan produksi bahan pangan pokok utama di Kabupaten Banjarnegara untuk tanaman padi, jagung dan Ubi Kayu mengalami penurunan. Lebih rinci ditampilkan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.7 Perkembangan Luas panen, Produksi, dan rata-rata produksi pangan pokok utama di Kabupaten Banjarnegara 2019-2023

Tahun	Padi			Jagung			Ubi Kayu		
	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
	(Ha)	(Ton)	(Ku/Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ku/Ha)	(Ha)	(Ton)	(Ku/H)
2019	24.178	170.541,7	70,53	9.117,3	53.474	58,65	3.476	90.200	259,49
2020	24.322	171.146	70,37	8.664	63.108	72,84	3.722	102.655	280,33
2021	25.131	169.204,92	61,95	7.853	51.949,82	53,77	4.597	130.274	248,05
2022	24.178	170.541,70	61,53	9.117	50.645,24	58,65	3.476	84.910,3	259,49
2023	24.322	171.146	70,37	8.664	63.108	72,84	3.722	102.655,3	280,33

Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Luas panen padi mulai tahun 2021 mengalami penurunan, karena alih fungsi lahan. Produktivitas padi mulai tahun 2020 mengalami kenaikan hal ini dikarenakan keberhasilan upaya intensifikasi.

Luas panen tanaman pangan utama lainnya seperti jagung di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan sejak tahun 2021, diduga karena terjadi alih fungsi lahan pertanian ke lahan bukan pertanian, sedangkan luas lahan ubi kayu yang cenderung naik, hal ini merupakan keberhasilan upaya diversifikasi pangan. Penurunan produksi bahan pangan pokok apabila tidak dikendalikan maka bisa mempengaruhi ketersediaan pangan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai langkah antisipasi mengatasi hal tersebut dengan program dan kebijakan yang pro petani.

## 2) Produksi Tanaman Hortikultura

Kabupaten Banjarnegara sangat potensial untuk pengembangan tanaman hortikultura. Hal ini karena didukung dengan kondisi lahan, iklim dan infrastruktur yang sesuai. Harga hasil panen tanaman hortikultura yang menjanjikan telah mengundang keinginan para petani untuk berkiprah di pertanian hortikultura. Perkembangan produksi tanaman hortikultura di Kabupaten Banjarnegara untuk Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Perkembangan Produksi Tanaman Hortikultura Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No.	Komoditas	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (ton)	2023 (Ton)
1	Manggis	5,61	5,72	9,255	4,850	4,016
2	Durian	952,5	1.168,4	673,630	1.229,830	29.009,281
3	Salak	35.001,1	37.634,380	36.021,26	23.033,460	181.688,639
4	Pisang	2.036,7	2.488,4	2.561,4	3.064,660	3.612,999
5	Cabai Besar	1.697,820	1.706,840	1.657,970	2.544,410	2.927,681
6	Wortel	9.235,410	7.226,5	6.476,950	6.314,650	5.174,330
7	Kentang	11.349,820	12.609,250	11.639,290	13.108,700	8.405,940

Sumber : Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Dari Tabel di atas, terlihat produksi tanaman hortikultura pada tahun 2023 meningkat dibandingkan produksi Tahun 2019 kecuali wortel dan kentang, hal ini diduga karena anomali iklim disamping kurang bergairahnya petani wortel karena harga jual wortel cenderung fluktuatif dan pada saat panen raya maka harga wortel akan mengalami titik terendah. Komoditas Durian juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan pada Tahun 2023 (29.009,281 ton) dibanding produksi Tahun 2019 (952,5 ton). Komoditas lainnya yang meningkat produksinya adalah salak, cabai, dan pisang.

## 3) Produksi Hasil Perkebunan

Produksi komoditas utama perkebunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2019-2023 khusus untuk bahan pangan meliputi: kelapa, kopi, kakao dan teh disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 2.9 Perkembangan Produksi Tanaman Perkebunan untuk Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No	Komoditas	Wujud Produksi	Produksi (Ton)				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Kelapa : - Kelapa Dalam - Hibrida - Kelapa Deres	Kelapa	11.184,2	12.178,69	13.195,58	13.855,21	9.615,98
2	Kopi : - Robusta - Arabika	Green Bean Green Bean	999,85	1.569,6	1.485,39	1.361,59	381,37
3	Kakao	Biji Kering	25,80	29,58	22,87	26,52	27,17
4	Teh	Pucuk kering	2.546,87	1.713,25	2.630,23	2.710,31	2.124,36

Sumber :Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Dari data di atas, produksi beberapa komoditas perkebunan relative mengalami peningkatan, tetapi dengan beberapa program yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan Ketahanan Pangan, maka diharapkan akan meningkat lagi produksinya. Pengembangan tanaman kopi yang dilakukan oleh masyarakat dengan fasilitas dari Bank Indonesia (BI) dan Islamic Development Bank (IDB) serta CSR dari beberapa perusahaan akan menjadikan Kabupaten Banjarnegara pada waktu yang akan datang sebagai salah satu sentra Kopi di Jawa Tengah.

#### 4) Produksi Peternakan

Produksi hasil ternak daging, susu dan telur di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun waktu Tahun 2019–2023 mengalami penurunan. Perkembangan produksi hasil ternak di Kabupaten Banjarnegara tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

Tabel 2.10 Perkembangan Produksi Ternak di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No	Komoditas	2019	2020	2021	2022	2023
1	Daging (kg)	1.687.062	1.604.956,38	2.109.251,6	2.004.427,9	1.984.369
2	Susu (liter)	50.400	42.700	48.038	18.865	35.180
3	Telur (butir)	109.104.567	91.276.895	124.535.004	125.644.357	118.768.701

Sumber :Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

Berbagai upaya peningkatan produksi di Bidang peternakan dilakukan oleh Pemerintah. Peningkatan produksi ternak dilakukan melalui optimalisasi Inseminasi Buatan (IB), Intensifikasi Kawin Alam (INKA), Pengembangan Agribisnis Peternakan melalui Lembaga Mandiri Mengakar di Masyarakat (LM3) dan Sarjana Membangun Desa (SMD), Pengembangan Budidaya Ternak Perah, Ternak Sapi/Kerbau Potong, Ternak Kambing, Perunggasan dan juga Aneka Ternak (kelinci dan lain-lain) melalui Pengembangan Kawasan serta didukung pelayanan kesehatan hewan. Pemerintah akan mengoptimalkan pencapaian 2 (dua) tujuan pembangunan peternakan yaitu peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan kesejahteraan masyarakat

5) Produksi Perikanan

Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Banjarnegara pada Tahun 2019 yaitu sebesar 1.251,2 Ton, turun menjadi 431,905 ton pada Tahun 2023. Demikian juga dengan produksi perikanan budidaya menurun dari 31.570 Ton pada tahun 2019 menjadi 478,172 Ton pada tahun 2023.

Tabel 2. 11 Perkembangan Produksi Perikanan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019 (Ton)	2020 (Ton)	2021 (Ton)	2022 (ton)	2023 (ton)
1	Perikanan tangkap	1.251,2	1.384,1	1.253,238	824,172	431,905
2	Perikanan budidaya	31.570	35.062,82	38.192,25	40.919,94	478,172

Sumber: Distankan dan KP Kabupaten Banjarnegara

3. Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kabupaten Banjarnegara dilakukan dengan pengadaan dan pengelolaan pada gudang CPP. Tahun 2019 telah dilakukan pengadaan sebesar 12,144 ton GKG atau setara beras 7,45 ton. sehingga total cadangan pangan sebesar 29,8 % dari target sebesar 25 ton beras dikarenakan keterbatasan anggaran. Cadangan pangan ini digunakan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan pangan di beberapa wilayah Kecamatan akibat rawan pangan, krisis pangan, bencana alam, gagal panen, kemiskinan dan keadaan darurat lainnya.

Selanjutnya untuk cadangan pangan masyarakat dilakukan melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM), merupakan kegiatan untuk meningkatkan kemandirian pangan melalui pengembangan jejaring pembelian dan penjualan gabah/beras LDPM dan pengembangan kemitraan usaha antar pelaku usaha.

4. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Penyuluhan merupakan salah satu bagian dalam proses pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang menjadi acuan dalam penyusunan program di tingkat Kecamatan agar terintegrasi dan terfokus. Pada tahun 2019 Kabupaten Banjarnegara memiliki Balai Penyuluhan sebanyak 20 unit dan Posluhdes sebanyak 82 Unit dari 20 kecamatan, dengan total tenaga penyuluh sejumlah 233 orang terdiri dari:

- a) penyuluh PNS sejumlah 82 orang terdiri
  - penyuluh pertanian sebanyak 66 orang
  - Penyuluh perikanan sebanyak 6 orang
  - Penyuluh kehutanan sebanyak 10 orang
- b) THL-TBPP sebanyak 68 orang ,
- c) Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 80 orang
- d) dan Penyuluh Perikanan Bantu 3 orang.

Dari jumlah penyuluh tersebut, presentase penyuluh yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang keahlian mencapai 100 %.

#### B. Capaian Pembangunan Bidang Gizi

Keadaan gizi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara terlihat dari beberapa indikator yang menunjukkan adanya tingkat keberhasilan yaitu antara lain masalah gangguan akibat kekurangan iodium (GAKI) yang semula Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah endemis Gaki tingkat berat dengan prevelensi sebesar 34,6 % pada tahun 1982. Namun dengan adanya intervensi iodoum yang diberikan melalui injeksi pada masyarakat yang berada di daerah endemis tingkat berat dan sedang yang selajutnya berkembang atau berubah dengan pemberian kapsul minyak beriodoum serta dengan pemasyarakatan garam beriodium secara beranggsur-angsur telah menunjukkan prevalensi yang terus menurun. Hasil pemetaan Gaki yang telah dilakukan pada tahun 1996 menunjukkan prevalensi Kabupaten Banjarnegara telah turun secara dratis menjadi 4,5 % dengan luas penyebaran daerah endemis Gaki juga menunjukkan semakin turun.

Penyebaran prevalensi Gaki di Kabupaten Banjarnegara pada tahun yang terakhir berdasarkan hasil pemeriksaan urine pada ibu hamil yang menunjukkan ada 20 Kecamatan atau semua kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang termasuk daerah endemik Gaki tingkat ringan. Karakteristik daerah gaki yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara tersebut terkait dengan dataran tinggi dan pegunungan, daerah terpencil, dan akses sarana transportasi rendah.

Sedangkan untuk masalah gizi yang lain adalah kekurangan vitamin A (KVA), hingga saat ini merupakan permasalahan gizi yang telah berhasil dikendalikan dengan baik melalui upaya intervensi pemberian suplementasi vitamin A dosis tinggi pada balita dan ibu nifas. Hal ini dibuktikan bahwa permasalahan KVA sekarang ini di Kabupaten Banjarnegara sudah tidak ditemukan lagi adanya anak balita dengan rabun senja (ada kotok ayam) yang merupakan salah satu tanda klinis terjadinya KVA. Namun demikian upaya intervensi melalui suplementasi vitamin A dosis tinggi ini masih terus dilanjutkan mengingat kadar vitamin A pada balita yang kurang dari 20 mg% masih sekitar 34% sehingga kalau dibiarkan dimungkinkan bisa memicu terjadinya KVA. Disisi lain kemanfaatan pemberian suplementasi vitamin A dosis tinggi ini selain bisa mencegah terjad KVA juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga akan mengurangi risiko kejadian sakit.

Permasalahan gizi lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dalam intervensinya adalah kurang darah (anemia), karena masalah anemia ini khususnya pada ibu hamil yang relatif masih tinggi dan upaya penanggulangannya yang telah dilakukan sudah cukup lama, namun hasilnya masih belum memberikan hasil yang menggembirakan.

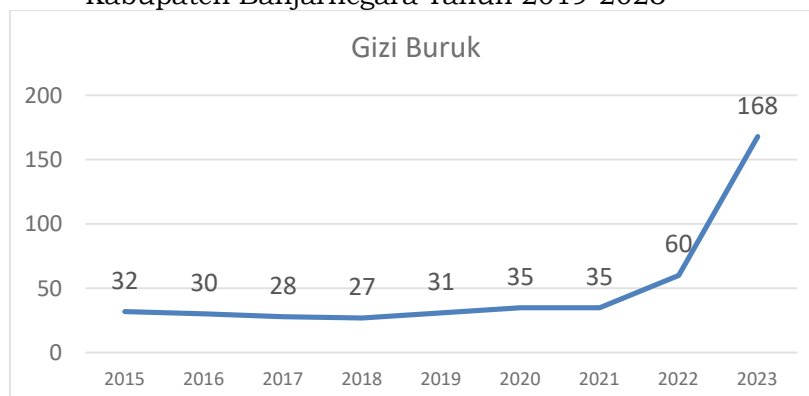
Berdasarkan hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 37,3%, dan pada Riskesdas tahun 2018 naik menjadi 48,9%, sedangkan pada tahun 2023 prevalensi ibu hamil anemia di Kabupaten Banjarnegara adalah 13,8%. keadaan inilah yang cukup memprihatinkan, karena permasalahan anemia pada ibu hamil ini berdampak cukup luas mulai dari upaya penurunan AKI dan AKB juga akan berdampak terhadap masalah stunting yang tentunya akan berimplikasi terhadap upaya peningkatan SDM di masa yang akan datang.

Permasalahan anemia pada ibu hamil ini pada dasarnya merupakan permasalahan yang cukup kompleks karena banyak kasus ibu hamil yang anemia ternyata juga kekurangan masalah gizi yang lain seperti kurang energi. Kronik (KEK) yang saling terkait dengan masalah anemia. Disamping itu permasalahan anemia ini juga sangat terkait dengan masalah penyakit menular yang lainnya dan parasit yang masih tinggi seperti TB paru, kecacingan dan penyakit kronik lainnya. Kondisi lainnya yang juga kurang menguntungkan dalam upaya penanggulangan anemia ini antara lain adalah kebiasaan masyarakat yang menyukai minum teh yang cukup kental yang akan berakibat terjadinya gangguan penyerapan Fe dalam tubuh yang dihambat oleh tanin dari minuman teh. Kebiasaan lainnya yang dirasakan kurang menguntungkan adalah konsumsi protein hewani dari ibu hamil yang relatif sangat rendah, sehingga dalam pembentukan sel darah merah dalam tubuh sangat rendah serta asupan suplementasi fe yang diberikan dalam intervensi yang diminum oleh ibu hamil sangat rendah dengan berbagai alasan dan kendala.

Permasalahan berikutnya adalah kekurangan energi dan protein (KEP) yang dapat dipantau dengan menggunakan parameter antropometri (ukuran tubuh). Ada beberapa indikator yang lazim digunakan di masyarakat sebagai alat pemantauan pertumbuhan balita yaitu berat badan dibandingkan dengan umur (BB/U) dan ukuran inilah yang sering digunakan sebagai alat deteksi dini gangguan pertumbuhan balita. Hal ini digunakan mengingat perubahan berat badan balita merupakan indikator yang sangat mudah diketahui dan diamati bila terjadi atau adanya gangguan kesehatan atau perubahan asupan gizi pada balita, sehingga pada indikator ini dikenal dengan adanya istilah gizi lebih, gizi baik, kurang dan gizi buruk.

Sedangkan masalah gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara selama 5 tahun terakhir ini menunjukkan kecenderungan yang menurun, namun pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan karena peningkatan pelaksanaan surveillans gizi, dimana pelaporan dan pencatatan kasus gizi buruk pada tahun 2022 dan 2023 menggunakan aplikasi e PPGBM, berbeda dengan tahun sebelumnya yang berdasarkan laporan manual dari Puskesmas. Kenaikan kasus ini di tindak lanjuti dengan validasi dan verifikasi ulang dan kunjungan rumah kasus tersebut, dan dilakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan apabila di temukan indikasi penyakit. Adapun kasus gizi buruk dapat dilihat pada grafik kecenderungan sebagaimana Gambar 2.2.

Gambar 2. 2 Grafik Perkembangan Kecenderungan Kasus Gizi Buruk Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023



Sedangkan permasalahan KEP lainnya yang saat ini menjadikan prioritas nasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangannya adalah stunting. Permasalahan stunting ini merupakan masalah gizi kronis yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, dan hal ini berdampak yang cukup luas terhadap upaya peningkatan kualitas SDM karena akan berpengaruh terhadap keadaan fisik dan tingkat kecerdasan, kognitif serta perilaku. Salah satu alat yang dapat digunakan sebagai indikator deteksi stunting adalah dengan menggunakan ukuran tinggi / panjang badan dibandingkan umur (PB atau TB/U)). Prevalensi stunting di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan dari aplikasi E PPGBM selama 5 tahun sejak tahun 2018 - 2023 menunjukkan kecenderungan yang menurun seperti terlihat pada tabel berikut :

Gambar 2.3 Prevalensi Stunting (E-PPGBM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018-2023



Secara keseluruhan prevalensi stunting di Kabupaten Banjarnegara berdasarkan hasil pada 5 tahun terakhir menunjukkan penurunan dari 29% tahun 2018 turun menjadi 17,5 % tahun 2023. Berdasarkan keadaan tersebut diatas, menunjukkan permasalahan stunting di Kabupaten.

Banjarnegara masih cukup tinggi, sehingga perlu mendapatkan pemahaman dan kepedulian dari berbagai pihak yang terkait guna melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan secara serius dan terintegrasi.

Ditinjau dari kondisi tingkat kecukupan gizi masyarakat di Kabupaten Banjarnegara masih terdapat anak balita yang mengalami masalah gizi, antara lain : Berat badan rendah, gizi kurang/buruk, pendek/sangat pendek (*stunting*), dan gizi lebih.

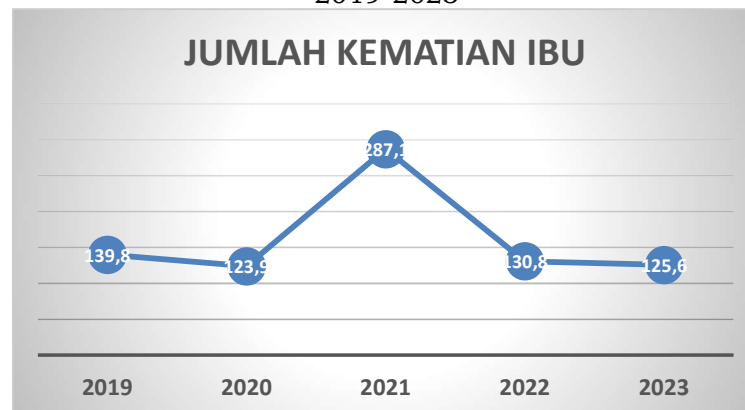
Indikasi *stunting* salah satunya bisa diketahui dari berat badan dan panjang badan bayi baru lahir. Anak dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yakni kurang dari 2.500 gram, panjang badan kurang dari 47 cm untuk bayi perempuan dan 48 cm untuk bayi laki laki, berpotensi *stunting* atau disebut bayi dengan resiko *stunting*. Agar anak tidak *stunting*, dan tidak terkena penyakit *degeneratif* dini, maupun terkena gizi buruk dan kurang gizi, diperlukan intervensi dini pada kasus bayi resiko *stunting* dengan pemberian ASI Eksklusif dan suplementasi gizi zink, sedangkan pada balita kurang dari dua tahun yang termasuk pendek dan sangat pendek diberikan intervensi gizi spesifik dan sensitif.

Balita memerlukan asupan gizi yang memadai sejak 1000 hari pertama kehidupannya, yakni sejak di dalam kandungan hingga usia 2 (dua) tahun. Sehingga, pasca memberi gizi yang baik saat ada dalam kandungan dan memberi ASI eksklusif, ibu juga harus memperhatikan masa MPASI (makanan pendamping ASI).

Permasalahan gizi terutama terjadi pada kelompok masyarakat miskin di pedesaan. Kecukupan gizi masyarakat dipengaruhi oleh konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang dan aman serta dapat memenuhi kecukupan gizi individu untuk tumbuh dan berkembang. Kekurangan gizi pada masa kehamilan dan anak usia dini menyebabkan keterlambatan dalam pertumbuhan fisik, perkembangan motorik atau kemampuan gerak dan gangguan perkembangan kognitif yang pada jangka panjang berakibat pada rendahnya kemampuan belajar.

Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi yaitu dari angka 139,8/100.000 KH di tahun 2019 menjadi 123,9/100.000 KH di tahun 2020. Paling tinggi tahun 2021 yaitu 287,1 karena pandemi covid 19 memberi andil cukup besar pada kasus kematian ibu. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Perkembangan kondisi AKI Kabupaten Banjarnegara kurun waktu tahun 2019 - 2023 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.

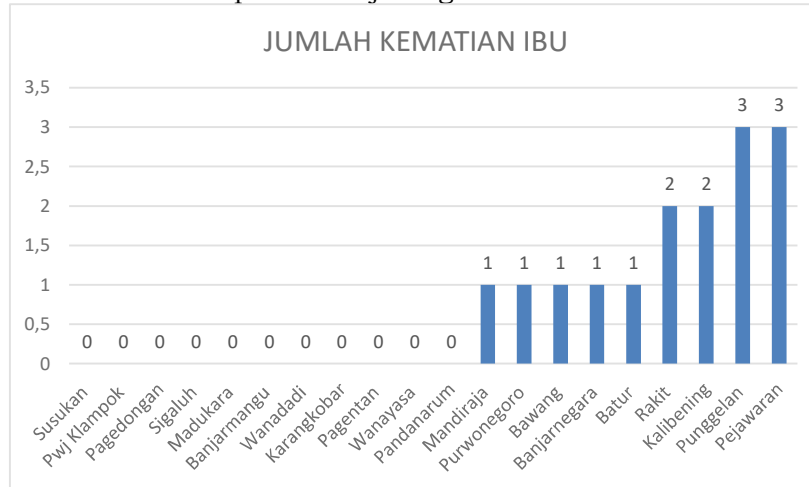
Gambar 2.4 Angka Kematian Ibu Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

Apabila dilihat dari kondisi kasus kematian ibu di Kecamatan se-Kabupaten Banjarnegara tahun 2023, terdapat 2 Kecamatan dengan kasus kematian ibu terbanyak yaitu Kecamatan Punggelan dan Pejawaran. Kasus kematian ibu di Kecamatan tahun 2023 tercantum dalam gambar berikut.

Gambar 2.5 Kasus Kematian Ibu Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

Gambaran tentang kondisi umum masalah gizi masyarakat meliputi :

- a. Prevalensi Pendek (*stunting*) pada Anak Balita di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi *stunting* di Kabupaten Banjarnegara dalam lima tahun terakhir (2019-2023) berdasarkan aplikasi e PPGBM angka prevalensinya cenderung menurun, Data *stunting* tahun 2023 sebesar 17,5% masih di bawah data provinsi sebesar 10%, akan tetapi apabila berdasarkan SKI (Survey Kesehatan Indonesia) tahun 2023, prevalensi *stunting* Banjarnegara sebesar 19,9% sudah memenuhi target bila dibanding data Provinsi Jawa Tengah sebesar 20,7%.

Gambar 2.6 Prevalensi Stunting di Jawa Tengah Tahun 2023 Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia



Sumber: Bappeda Provinsi Jateng

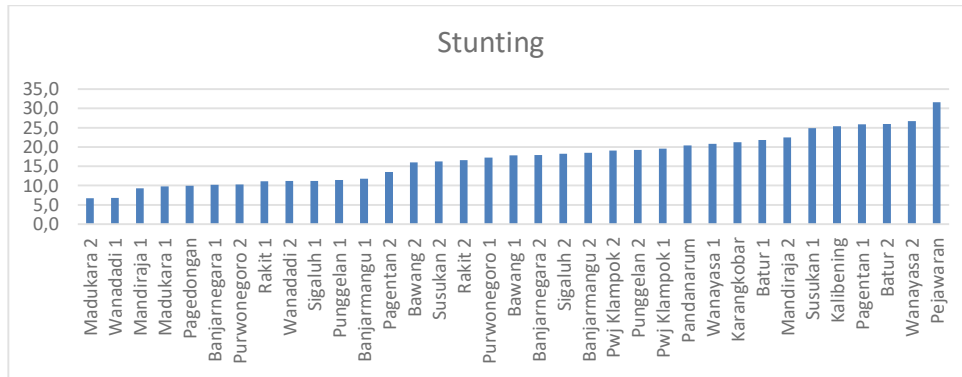
Dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan dan baduta usia 0-23 bulan. Masih adanya kasus *stunting* di Kabupaten Banjarnegara disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman, ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat

pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

b. Prevalensi Pendek (*stunting*) pada Anak Balita Per Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

Mendasarkan prevalensi *stunting* di Kabupaten Banjarnegara tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 17,5 %, dan diketahui terdapat 3 Kecamatan dengan *stunting* tertinggi yaitu Puskesmas Pejawaran, Wanayasa 2, Batur 2, Pagentan 1 dan Kalibening.

Gambar 2.7 Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan yaitu terhadap kebutuhan ASI Eksklusif. Tabel berikut menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.12 Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016-2023

Tahun	Jumlah Bayi	Bayi yang diberi ASI eksklusif	Cakupan (%)
2016	15654	9275	59,3
2017	15456	8905	57,6
2018	15987	9825	61,5
2019	16637	10214	61,4
2020	14673	10557	71,9
2021	14097	9986	70,8
2022	13132	9701	73,9
2023	3406	2791	81,9

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara

Pemberian ASI Eksklusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu paya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

c. Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk pada Anak Balita (Indeks BB / TB) di Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Nasional dan Provinsi Jawa Tengah.

Indikator Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB) menggambarkan status gizi yang sifatnya akut sebagai akibat dari keadaan yang berlangsung dalam waktu pendek karena diare atau sakit lainnya. Dalam keadaan demikian berat badan anak akan cepat turun sehingga tidak proposional lagi dengan tinggi badan dan anak menjadi kurus.